

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022



DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON



DISHUB CIREBON KOTA



@DISHUBCIREBONKOTA



DISHUB.CIREBONKOTA.GO.ID

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2022 telah selesai disusun.

Tersusunnya LKIP Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2022, maka dapat dilihat gambaran capaian kinerja penyelenggaraan perhubungan di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Cirebon selama tahun 2022.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf yang sudah bahu membahu menyusun LKIP Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2022 ini, semoga dapat menjadi acuan ke depan untuk selalu meningkatkan kinerja pelayanan publik yang andal dan responsif.

Cirebon, 31 Januari 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA CIREBON



4. Drs. ANDI ARMAWAN, M.Si
NIP. 19691214 199003 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon selama tahun 2022 atas kinerja yang sudah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

Dalam rangka mewujudkan visi Wali Kota Cirebon "Sehati Kita Wujudkan Kota Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah", misi ke-3 Wali Kota Cirebon yang menjadi acuan pelaksanaan urusan perhubungan yaitu "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan" maka ditetapkan rencana kegiatan yang berisi target kegiatan yang hendak dicapai dalam periode 1 tahun.

Laporan ini disusun bertujuan untuk melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja di kemudian hari. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2022 disusun melalui pengukuran kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2022 yang melibatkan seluruh bidang dinas perhubungan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan target kinerja yang disepakati dengan hasil pengukuran kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Perhubungan Kota Cirebon memperoleh anggaran sebesar Rp. 29.174.985.225,- digunakan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 dan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon. Realisasi anggaran yang sudah diserap sebesar 95% dari total anggaran yang diterima tahun ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Susunan Organisasi dan Tupoksi	7
1.3 Isu – Isu Strategis	29
1.4 Inovasi Dalam Penyelenggaraan Tugas	29
BAB II PERENCANAAN KINERJA	32
2.1 Rencana Strategis	32
2.2 Arah Kebijakan	34
2.3 Indikator Kinerja Utama	37
2.4 Perjanjian Kinerja	38
2.5 Rencana Anggaran	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	43
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	43
3.2 Akuntabilitas Keuangan	55
BAB IV PENUTUP	56
LAMPIRAN	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Cirebon	27
Gambar 1.2 Aplikasi Smart PJU	28
Gambar 1.3 Aplikasi QRIS	29
Gambar 1.4 Tampilan Website SIGFLAJ	30
Gambar 1.5 Pantauan Lalu Lintas Melalui ATCS	30
Gambar 3.1 Penertiban Parkir Oleh Tim Dalops dan Tim UPT Parkir	46
Gambar 3.2 Perbaikan Penerangan Jalan Umum oleh Tim UPT PJU	46
Gambar 3.3 Pelaksanaan Giat 68	46
Gambar 3.4 ATCS Dinas Perhubungan Kota Cirebon	47
Gambar 3.5 Pemeliharaan Rambu dan Perbaikan Lampu APILL	47
Gambar 3.6 Pelaksanaan Angkutan Lebaran dan NATARU	48
Gambar 3.7 Sosialisasi Keselamatan Pengguna Jalan	48
Gambar 3.8 Forum LLAJ	48
Gambar 3.9 Pengecekan Kartu Vaksin	49
Gambar 3.10 Kegiatan Ganjil Genap	49
Gambar 3.11 Uji Coba Koridor II BRT Kota Cirebon	50
Gambar 3.12 Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	51
Gambar 3.13 BRT Kota Cirebon	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Dinas Perhubungan Tahun 2022	30
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan	32
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama	34
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022	35
Tabel 2.5 Rencana Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2022	36
Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	41
Tabel 3.2 Capaian Sasaran 1 Menurunnya Titik Kemacetan Lalu Lintas	42
Tabel 3.3 Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)	43
Tabel 3.4 V/C Rasio Ruas Jalan	44
Tabel 3.5 Capaian Sasaran 2 Tersedianya Angkutan Umum Massal yang Ramah Lingkungan	49
Tabel 3.6 Data Kendaraan Umum yang Lulus Uji Kota Cirebon Tahun 2022	50
Tabel 3.7 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	51
Tabel 3.8 Perbandingan Anggaran 2021 dan 2022	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan kinerja instansi pemerintah merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang wajib dibuat oleh penyelenggara negara termasuk satuan kerja pemerintah daerah (SKPD). SAKIP dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah. Penyelenggaraan SAKIP tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 29 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja serta Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Di dalam SAKIP, seluruh SKPD termasuk Dinas Perhubungan Kota Cirebon diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Untuk periode tahunan, setiap SKPD menyusun rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Selanjutnya DPA tersebut digunakan sebagai dasar acuan untuk menyusun perjanjian kinerja.

Laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai SKPD dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun setiap akhir tahun.

1.2 Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Cirebon

Dinas Perhubungan Kota Cirebon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Cirebon.

Sedangkan Dasar Hukum pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon adalah Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon mempunyai rincian tugas sebagai berikut

a. Tugas Pokok

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya

c. Struktur Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Cirebon telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut:

a. Unsur Organisasi

Unsur organisasi Dinas terdiri dari :

- 1) unsur pimpinan adalah Kepala Dinas;
- 2) unsur staf adalah Sekretaris;
- 3) pembantu unsur staf adalah Kepala Sub Bagian;
- 4) unsur lini adalah Kepala Bidang;
- 5) pembantu unsur lini adalah kepala Seksi;
- 6) UPT; dan
- 7) pelaksana teknis operasional dan/atau administrasi adalah kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.

b. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Cirebon terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari:
 - a. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - c. Seksi Prasarana Lalu Lintas.
4. Bidang Angkutan dan Multimoda, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Jaringan Trayek;
 - b. Seksi Penyediaan, Pembinaan dan Pengendalian Angkutan; dan
 - c. Seksi Terminal dan Multimoda.
5. Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana, terdiri dari:
 - a. Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan;

- b. Seksi Penyuluhan Keselamatan; dan
 - c. Seksi Pengendalian dan Operasional.
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Tugas dan Unsur Organisasi

A. Kepala Dinas

1. Tugas pokok

Kepala - Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

2. Fungsi:

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas;
- 2) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dinas operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas;
- 3) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- 5) Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- 6) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

B. Sekretariat

1. Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dan

pelayanan administratif Dinas

2. Fungsi

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian;
- c. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas;
- d. Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang perhubungan;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
- g. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas;
- h. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sekretariat membawahkan :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Tugas Pokok

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah

tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.

(2) Fungsi

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencanakerja;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- c. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Pengelola pelaksanaan kerumah tanggaan, perlengkapan, perpustakaan, humas, dan protokol;
- f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Program dan Keuangan

(1) Tugas Pokok

Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/ informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan

bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

(2) Fungsi

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas;
- c. pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas;
- d. pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang Perhubungan;
- e. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
- f. penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas;
- g. penyiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Dinas;
- h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Lalu Lintas

1. Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan bidang lalu lintas.

2. Fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Lalu Lintas;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Lalu Lintas;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Lalu Lintas;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Lalu Lintas;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Lalu Lintas;
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Lalu Lintas;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Lalu Lintas; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

3. Bidang Lalu Lintas, membawahkan :

- a. Seksi Manajemen Lalu Lintas

(1) Tugas Pokok

Seksi Manajemen Lalu Lintas sebagai pembantu unsur

ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas penyelenggaraan manajemen lalu lintas.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang, lingkup Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Manajemen Lalu Lintas; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas

(1) Tugas Pokok

Seksi Rekayasa Lalu Lintas sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan rekayasa lalu lintas.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

c. Seksi Prasarana Lalu Lintas

(1) Tugas Pokok

Seksi Prasarana Lalu Lintas sebagai pembantu unsur lini

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan prasarana lalu lintas.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Prasarana LaluLintas;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Prasarana LaluLintas;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Prasarana LaluLintas;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Prasarana LaluLintas;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Prasarana LaluLintas;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Prasarana Lalu Lintas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

D. Bidang Angkutan dan Multimoda

1. Tugas Pokok :

Membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan

angkutan dan multimoda.

2. Fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Angkutan dan Multimoda;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Angkutan dan Multimoda;
- c. Pelaksanaan fungsi tugas pokok Bidang Angkutan dan Multimoda;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Angkutan dan Multimoda;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Angkutan dan Multimoda;
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Angkutan dan Multimoda;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Angkutan dan Multimoda; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

3. Bidang Angkutan dan Multimoda, membawahkan:

- a. Seksi Perencanaan Jaringan Trayek

(1) Tugas Pokok

Seksi Perencanaan Jaringan Trayek sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam

memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan angkutan dalam trayek.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang, lingkup Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek; dan;
 - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- b. Seksi Penyediaan, Pembinaan dan Pengendalian Angkutan

(1) Tugas Pokok

Seksi Penyediaan, Pembinaan dan Pengendalian Angkutan sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan AngkutanBarang;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang

lingkup Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang; dan

h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

c. Seksi Terminal dan Multimoda

(1) Tugas Pokok

Seksi Terminal dan Multimoda sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan terminal dan multimoda.

(2) Fungsi

a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Terminal dan Multimoda;

b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Terminal dan Multimoda;

c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Terminal dan Multimoda;

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Terminal dan Multimoda;

e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;

f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Terminal dan Multimoda;

- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Terminal dan Multimoda; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

E. Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana

1. Tugas Pokok :

Membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan keselamatan dan tehnik sarana.

2. Fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana;
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana;

- h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
3. Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana, membawahkan:
- a. Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan
 - (1) Tugas Pokok

Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan audit dan investigasi keselamatan.
 - (2) Fungsi
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang, lingkup Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;

f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;

g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan; dan

h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Seksi Penyuluhan Keselamatan

(1) Tugas Pokok

Seksi Penyuluhan Keselamatan sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyuluhankeselamatan.

(2) Fungsi

a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi PenyuluhanKeselamatan;

b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Penyuluhan Keselamatan;

c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Penyuluhan Keselamatan;

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi PenyuluhanKeselamatan;

e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;

- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Penyuluhan Keselamatan;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Penyuluhan Keselamatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

c. Seksi Pengendalian dan Operasional

(1) Tugas Pokok

Seksi Pengendalian dan Operasional sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas pengendalian dan operasional.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Pengendalian dan Operasional;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Pengendalian dan Operasional;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Seksi Pengendalian dan Operasional;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Seksi Pengendalian dan Operasional;

- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengendalian dan Operasional;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Pengendalian dan Operasional; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

F. Unit Pelayanan Teknis (UPT)

- a. UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
- b. UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi UPT diatur dengan Peraturan Wali Kota.

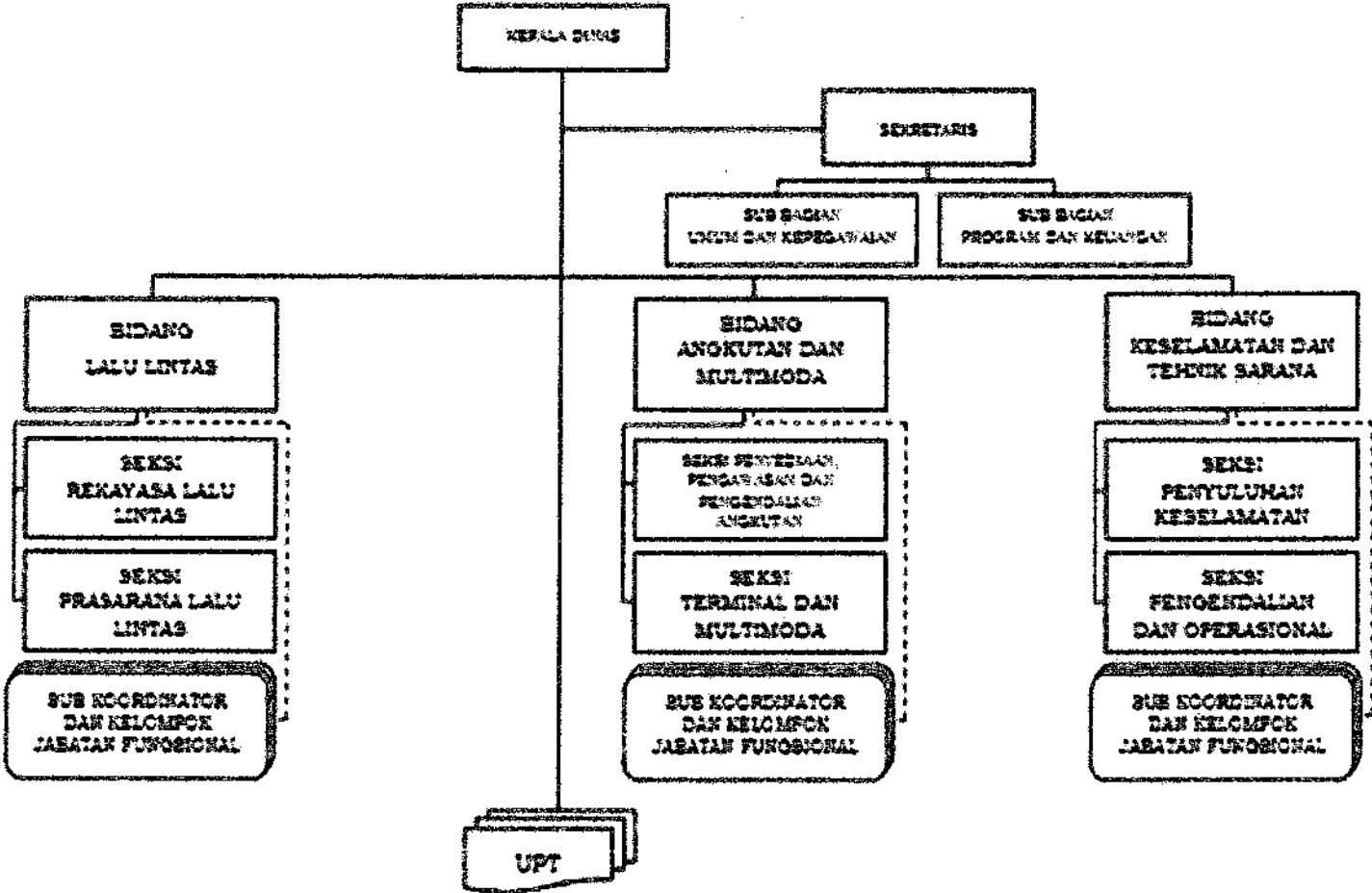
G. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan sebagian kegiatan Dinas sesuai kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- d. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di

lingkungan Dinas.

- e. Pembentukan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- f. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Cirebon



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Cirebon

1.3 Isu – Isu Strategis

Beberapa isu penting di Dinas Perhubungan Kota Cirebon, diantaranya adalah :

1. Pengembangan Taman Edukasi Lalu Lintas;
2. Pengembangan ATCS;
3. Peningkatan Kualitas SDM Dinas Perhubungan yang Handal dan Profesional;
4. Kesemerawutan Lalu Lintas pada ruas - ruas jalan CBD;
5. Perlintasan Kereta Api Sebidang;
6. Angkutan Massal Perkotaan;
7. Adanya angkutan umum berbasis aplikasi (online);
8. Aksesibilitas Transportasi Bandara Kertajati;
9. Pengaturan Angkutan Barang Dalam Kota;

1.4 Inovasi Dalam Penyelenggaraan Tugas

Inovasi Dinas Perhubungan Kota Cirebon :

1. Smart Card Uji Kir

Kartu yang di peruntukan untuk pengguna kendaraan wajib KIR sebagai pengganti dari buku uji KIR.

2. Smart PJU

Pembaruan penggunaan lampu PJU dengan lampu Light Emitting Diode (LED) dapat memudahkan dalam pengontrolan penggunaan lampu PJU di Kota Cirebon, aplikasi yang digunakan inilah yang dinamakan Smart PJU.

Smart PJU berbentuk website yang hanya dapat di akses oleh Ka UPT PJU Dinas Perhubungan Kota Cirebon, yang berfungsi untuk mengetahui jumlah lampu PJU yang mati dan hidup serta dapat mengontrol daya Lampu PJU di Kota Cirebon sehingga dapat memudahkan UPT PJU dalam memberikan layanan untuk masyarakat.



Gambar 1.2 Aplikasi Smart PJU

3. Parkir Non Tunai QRIS

Adalah bentuk pembayaran parkir secara non tunai (gopay,ovo,shopeepay,dll) yang sudah diterapkan pada jalan pagongan, dan nanti kedepannya akan diterapkan di seluruh kantong parkir di Kota Cirebon.



Gambar 1.3 Aplikasi QRIS

4. Sistem Informasi Geografis Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Adalah website yang bisa diakses masyarakat untuk mengetahui informasi terkait fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan di ruas jalan Kota Cirebon.

<http://sigflaj.cirebonkota.go.id/>



Gambar 1.4 Tampilan Website SIGFLLAJ

5. ATCS (Area Traffic Control System)

Pengendalian lalu lintas di persimpangan Kota Cirebon secara terpusat pada ruang kendali di Dinas Perhubungan Kota Cirebon melalui CCTV yang terpasang di beberapa persimpangan di Kota Cirebon.



Gambar 1.5 Pantauan lalu lintas melalui ATCS

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk lima tahun ke depan yang disusun untuk menjamin konsistensi pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen dengan perjanjian kinerja yang sudah disepakati berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Cirebon demi perkuatan landasan program dan kegiatan tahunan daerah secara sistematis dan berkelanjutan. Penyusunan Rencana Strategis SKPD merupakan penjabaran yang lebih detail dari rancangan pembangunan daerah kota Cirebon sehingga semua langkah – langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Cirebon sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018 – 2023. Visi Misi Wali Kota Cirebon sebagai berikut

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Sesuai dengan arah kebijakan Kota Cirebon 2018 - 2023 maka seluruh Perangkat Daerah diarahkan untuk turut serta mensukseskan Visi Misi Kota Cirebon tahun 2018 - 2023, dimana Visi Kota Cirebon selama 5 tahun adalah

“SEHATI Kita Wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis

Budaya dan Sejarah”

Misi adalah segala sesuatu (strategi, tindakan) yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. misi dapat juga didefinisikan sebagai penjabaran suatu visi dimana dibuat dengan lebih lengkap sehingga dapat dipahami setiap orang yang membacanya. Sedangkan misi yang ditetapkan walikota Cirebon berdasarkan visi tersebut adalah :

- 1) Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya, Unggul dalam Segala Bidang;
- 2) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa dan inovatif;
- 3) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum yang berwawasan lingkungan;
- 4) Mewujudkan keamanan dan ketertiban umum yang kondusif;

Dan untuk Dinas Perhubungan Kota Cirebon mengacu pada visi misi diatas maka yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan urusan Perhubungan Kota Cirebon terdapat 1 (satu) rumusan Misi Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 - 2023 yang ada relevansi dan keterkaitannya Untuk mendapat dukungan dan diaktualisasikan oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon yaitu Misi ke 3 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Sasaran dan Indikator

Dinas Perhubungan Kota Cirebon

Tahun 2021

Sasaran RPJMD yang diacu	Sasaran Renstra DISHUB	Indikator Kinerja Utama	2021
<i>Misi Ke-3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan.</i>			
Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Jalan	Menurunnya titik rawan kemacetan lalu lintas	Jumlah rawan titik kemacetan	3 titik
Meningkatkan Layanan Sarana Angkutan Umum	Tersedianya angkutan umum massal yang ramah lingkungan	Rasio jumlah armada yang ramah lingkungan terhadap	8 unit

Masyarakat		jumlah armada	
	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	90%

Tabel diatas menjelaskan bahwa apa yang menjadi sasaran dan indikator Dinas Perhubungan Kota Cirebon digunakan untuk mendukung visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Cirebon sehingga dapat berjalan selaras dengan apa yang menjadi visi dan misi ke-3 Kota Cirebon.

2.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan instrument langkah-langkah dalam perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Perhubungan agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman dalam menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD dan Kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Dinas Perhubungan Kota Cirebon

VISI : "SEHATI KITA WUJUDKAN KOTA CIREBON SEBAGAI KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA DAN SEJARAH

MISI I : "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan"

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Layanan Sarana Angkutan Umum Masyarakat	Tersedianya Angkutan Umum Masal Yang Ramah Lingkungan	Peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan	tinggi dan tepat guna, membangun sistem angkutan massal, meningkatkan kuantitas dan kualitas angkutan umum melalui peremajaan armada bus sedang, penambahan dan penataan trayek, penataan tempat pemberhentian angkutan umum serta pelayanan hari-hari besar

MISI II: "Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif"

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Jalan	Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas	Optimalisasi rekayasa, sosialisasi dan pengendalian lalu lintas dalam rangka	Melakukan manajemen rekayasa lalu lintas, pengendalian dan pengamanan lalu
		Mengoptimalkan standar keselamatan lalu lintas	Menerapkan standar pengujian kendaraan bermotor
		Menata sistem perpakiran yang sudah ada serta menyediakan fasilitas parkir	Penerapan / perubahan geometris sistem parkir, penerapan sistem perparkiran

2.3 Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kota Cirebon melalui Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Utama (IKU). Pemerintah Kota Cirebon telah menetapkan indikator kinerja utama Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2019-2023. Indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kota Cirebon sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama						Sumber Data	Keterangan
Sasaran RPJMD yang diacu	Sasaran Renstra SKPD		2019	2020	2021	2022	2023		
Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan	Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas	Tingkat Pelayanan Ruas Jalan Satuan	Nilai C	Nilai C	Nilai B	Nilai B	Nilai B	Renstra 2019 - 2023 Dishub Kota Cirebon	
		Jumlah Titik Rawan Kemacetan	5 titik	4 titik	3 titik	2 titik	1 titik	Renstra 2019 - 2023 Dishub Kota Cirebon	
Meningkatkan Layanan Sarana Angkutan Umum Masyarakat	Tersedianya Angkutan Umum Masal Yang Ramah Lingkungan	Tingkat Penggunaan Angkutan Umum (Moda Share)	40%	50%	60%	70%	80%	Renstra 2019 - 2023 Dishub Kota Cirebon	
		Rasio Jumlah Armada Yang Ramah Lingkungan Terhadap Jumlah Armada	5 unit	7 unit	8 unit	9 unit	10 unit	Renstra 2019 - 2023 Dishub Kota Cirebon	

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja tahun 2022 menguraikan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon dengan indikator dan target kinerja yang telah direncanakan dalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Cirebon dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan memperhatikan besaran anggaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang telah disusun maka untuk mewujudkannya hal tersebut dituangkan dalam rencana program dan kegiatan, adapun uraian perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Perjanjian Kinerja DISHUB Tahun 2022

No	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target
1	Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas	Jumlah Titik Rawan Kemacetan Dari 3 Titik Menjadi 2 Titik	2 titik
2	Tersedianya Angkutan Umum Massal Yang Ramah Lingkungan	Rasio Jumlah Armada Yang Ramah Lingkungan Terhadap Jumlah Armada	10 unit
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	95%

2.5 Rencana Anggaran

Untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaiannya pada tahun 2021, pelaksanaan program dan kegiatan untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DISHUB Kota Cirebon tahun 2022:

Tujuan	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Anggaran
Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Jalan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 22.843.429.722
	Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 270.857.144
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 4.381.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 1.444.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 1.444.000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 1.444.000
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 1.444.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 252.577.144
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 8.123.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 12.437.379.018
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 12.432.372.018
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 5.007.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 310.016.195
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 310.016.195
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 359.008.240
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 50.654.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 1.176.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 8.228.240
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 142.500.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 0
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 156.450.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 8.494.080
		Pengadaan Mebel	Rp 0
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Rp

		atau Bangunan Lainnya	0
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 8.494.080
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 8.977.346.450
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 8.147.443.600
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 829.902.850
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 480.328.595
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 41.886.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 339.034.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 94.125.600
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 2.482.995
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 2.800.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp 6.331.555.503
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp 1.582.243.517
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp 0
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp 894.755.273
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp 687.488.244
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rp 0
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Rp 0
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp 314.117.000
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp 0
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 314.117.000
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 672.039.296
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 165.000.000

		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 286.948.990
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 42.535.000
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 177.555.306
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 740.203.940
		Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Rp 189.775.200
		Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 0
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp 550.428.740
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 0
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp 30.950.000
		Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Rp 30.950.000
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.532.000.000
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.532.000.000
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp -

		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
		JUMLAH	Rp 29.174.985.225

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022 disusun dalam rangka menyajikan capaian kinerja Dinas Perhubungan selama tahun 2022 sebagai pelaksanaan amanah yang diemban organisasi. Isi dari akuntabilitas kinerja tersebut merupakan uraian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan penjabarannya, penjelasan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Dinas Perhubungan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Dalam proses pengukuran capaian kinerja ini perlu diperhatikan asas perimbangan biaya, manfaat, efisiensi dan efektivitas.

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan urusan Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2018-2023, perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian Misi Daerah Kota Cirebon tahun 2018-2023. Terdapat 1 (satu) rumusan Misi Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023 yang perlu mendapat dukungan dan diaktualisasikan oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon yaitu :**Misi ke-3 “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan.”**

Sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Cirebon yaitu:

- 1) Menurunnya titik rawan kemacetan lalu lintas;
- 2) Tersedianya angkutan umum massal yang ramah lingkungan;
- 3) Meningkatnya kinerja pelayanan publik.

Hal ini merupakan upaya pendukung Visi Misi Kota Cirebon khususnya pada Misi 3 Pemerintah Daerah Kota Cirebon "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan". Untuk menunjang misi ke-3 berikut ini merupakan hasil pengukuran indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Tahun 2022 :

Tabel 3.1

Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama DISHUB Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas	Jumlah Titik Rawan Kemacetan	2 titik	2 titik	100%
2	Tersedianya Angkutan Umum Masal Yang Ramah Lingkungan	Rasio Jumlah Armada Yang Ramah Lingkungan Terhadap Jumlah Armada	10 unit	10 unit	100%
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	95%	95%	100%
Rata-rata					100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator kinerja sasaran yang ditetapkan capaian kinerjanya yaitu **100%**.

3.1.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Di sub bagian ini akan dijelaskan mengenai pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja pada sasaran yang dimiliki Dinas Perhubungan pada Tahun 2022. Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan / beberapa tahun yang lalu. Selain itu juga evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

Sasaran 1 : "Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas"

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran menurunnya titik rawan kemacetan lalu lintas dengan 1 indikator mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil. Pencapaian indikator sasaran tersebut dapat diperlihatkan pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Capaian Sasaran 1 Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas

Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target	Tercapai / Tidak	Target Akhir Renstra
Jumlah Titik Rawan Kemacetan Dari 3 Titik Menjadi 2 Titik	5 titik	4 titik	3 titik	2 Titik	2 titik	Tercapai	1 titik

Capaian sasaran menurunnya titik rawan kemacetan lalu lintas dengan satu indikator kinerja tahun 2021 terlihat bahwa realisasi capaiannya sudah mencapai target yang ditetapkan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kinerja segmen jalan adalah

dengan derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan atau degree of saturation (DS) didefinisikan sebagai rasio arus lalu lintas (smp/jam) terhadap kapasitas (smp/jam) yang digunakan sebagai factor utama dalam penentuan tingkat kinerja segmen jalan. Nilai DS menunjukkan apakah segmen jalan tersebut memiliki masalah kapasitas atau tidak. Derajat kejenuhan dirumuskan seperti persamaan sebagai berikut:

$$DS = \frac{Q}{C}$$

Sumber: MKJI, 1997

Keterangan :

- DS = Derajat kejenuhan (smp/jam)
 Q = Volume arus total (smp/jam)
 C = Kapasitas ruas jalan (smp/jam)

Tabel 3.3

Tingkat Pelayanan Jalan atau *Level of Service* (LOS)

Tingkat Pelayanan Jalan	Karakteristik Lalu Lintas	Q/C
A	Kondisi arus lalu lintas bebas dengan kecepatan tinggi dan volume lalu lintas rendah	0,00-0,20
B	Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas.	0,20-0,44
C	Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan.	0,45-0,74
D	Arus mendekati tidak stabil, kecepatan masih dapat dikendalikan, V.C Ratio masih dapat ditolerir	0,75-0,84
E	Arus tidak stabil, kecepatan terkadang terhenti,	0,85-1

Tingkat Pelayanan Jalan	Karakteristik Lalu Lintas	Q/C
	permintaan sudah mendekati kapasitas	
F	Arus dipaksakan, kecepatan rendah, volume di atas kapasitas, antrian panjang (macet)	$\geq 1,00$

Tabel 3.4

No.	Nama Ruas Jalan	Volume (V)	Kapasitas (C)	V/C Ratio	LOS (Level of Service)
1	Siliwangi	1207,65	2695,68	0,45	B
2	Dr.Cipto Mangunkusumo	2228	2854,17	0,78	D
3	Pemuda	1698,2	2484	0,68	C
4	Pekiringan	2001	2648	0,76	D

Ada berbagai macam kegiatan yang menjadi katalis positif di dalam pencapaian target indikator sasaran kinerja yaitu :

1. Penertiban kawasan perparkiran di beberapa ruas jalan di kota Cirebon untuk mengurangi faktor hambatan samping sebagai pemicu kemacetan di ruas jalan dan penyempitan lajur (Bottle Neck).





Gambar 3.1 Penertiban Parkir Oleh Tim Dalops dan Tim UPT Parkir

- Perbaikan lampu penerangan jalan umum oleh Tim PJU yang selalu stanby 24 jam untuk monitoring di lapangan guna melakukan perbaikan dan pemeliharaan fasilitas PJU



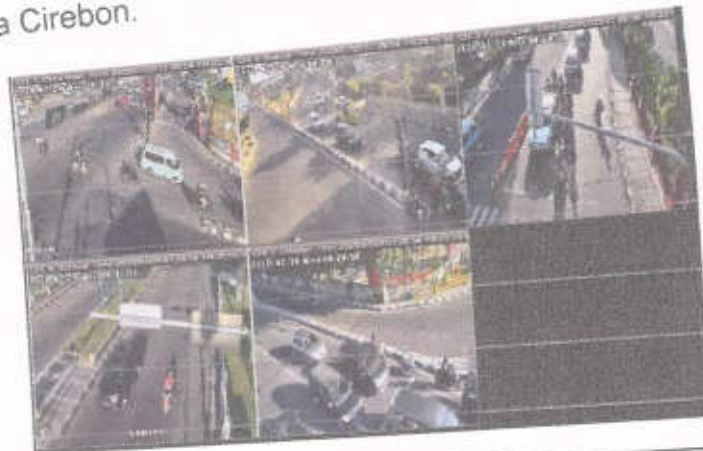
Gambar 3.2 Perbaikan Lampu Penerangan Jalan Umum oleh Tim PJU

- Adanya giat 68 yang dilakukan untuk mengawasi dan melakukan pengaturan arus lalu lintas pada ruas jalan dan simpang bersinyal di Kota Cirebon.



Gambar 3.3 Pelaksanaan Giat 68

4. Pengendalian lalu lintas terpusat dan terkontrol melalui Area Traffic Control System (ATCS) yang memiliki 11 kamera CCTV di simpang bersinyal kota Cirebon.



Gambar 3.4 ATCS Dinas Perhubungan Kota Cirebon

5. Pelaksanaan Perbaikan rambu – rambu dan Lampu APILL pada ruas jalan dan simpang – simpang yang ada di Kota Cirebon



Gambar 3.5 Pemeliharaan Rambu dan Perbaikan Lampu APILL

6. Kegiatan pengamanan Angkutan Lebaran dan Natal Tahun Baru (NATARU) Tahun 2022





Gambar 3.6 Pelaksanaan Angkutan Lebaran dan NATARU

7. Pelaksanaan sosialisasi keselamatan pengguna jalan pada saat melintasi perlintasan rel sebidang guna menekan terjadinya kecelakaan antara kendaraan bermotor dan kereta api.



Gambar 3.7 Sosialisasi Keselamatan Pengguna Jalan

8. Pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk membahas permasalahan teknis maupun non teknis bidang perhubungan yang ada di Kota Cirebon dengan instansi lainnya.



Gambar 3.8 Forum LLAJ

9. Pengecekan kartu vaksin dan surat antigen pada saat berlangsungnya PPKM level 2 di Kota Cirebon di Triwulan I



Gambar 3.9 Pengecekan Kartu Vaksin

10. Pelaksanaan kegiatan ganjil genap di Kota Cirebon pada Pos Check Point Krucuk, Kalijaga dan Penggung untuk menekan titik kemacetan di ruas jalan di Kota Cirebon karena pola pergerakan penglaju.



Gambar 3.10 Kegiatan Ganjil Genap

Sasaran 2 : "Tersedianya Angkutan Umum Massal Yang Ramah Lingkungan"

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran tersedianya angkutan umum massal yang ramah lingkungan dengan 1 indikator mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil. Pencapaian indikator sasaran tersebut dapat diperlihatkan pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Capaian Sasaran 2 Tersedianya Angkutan Umum Massal Yang Ramah Lingkungan

Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target	Tercapai / Tidak	Realisasi 2022	Target Akhir Renstra
Rasio Jumlah Armada Yang Ramah Lingkungan Terhadap Jumlah Armada	5 unit	10 unit	10 Unit	8 unit	Tercapai	10 Unit	10 unit

Capaian sasaran tersedianya angkutan umum massal Yang ramah lingkungan dengan satu indikator kinerja tahun 2022 terlihat bahwa realisasi capaiannya sudah mencapai target yang ditetapkan. Ada beberapa faktor yang mendukung Pencapaian target indicator kinerja pada Sasaran 2 yaitu :

1. Pelaksanaan uji coba pra launching BRT Kota Cirebon Koridor 2



Gambar 3.11 Uji Coba BRT Kota Cirebon

2. Adanya Kegiatan Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor untuk mengeluarkan bukti uji lulus kelaikan kendaraan.



Gambar 3.12 Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Tabel 3.6

Data Kendaraan Umum Lulus Uji Kota Cirebon Tahun 2022

No	JenisKendaraan	Lulus Uji	Tidak Lulus
1	Taksi	2	-
2	Angkutan Kota	270	-
3	Kereta Tempelan	478	3
4	Bus	111	-
5	Mobil Barang	2579	52
6	Kereta Gandengan	442	5
TOTAL		3882	60

3. Tersedianya pemeliharaan sarana tempat – tempat pemberhentian angkutan umum (halte) yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jasa angkutan umum.
4. Pemeliharaan terhadap fasilitas prasarana lalu lintas (halte) yang dilakukan oleh bidang lalu lintas agar selalu berfungsi sesuai dengan fungsinya.
5. Adanya Angkutan massal berupa Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Cirebon.



Gambar 3.13 BRT Kota Cirebon

Sasaran 3 : "Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik"

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dengan 1 indikator mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil. Pencapaian indikator sasaran tersebut dapat diperlihatkan pada tabel berikut :

Tabel 3.7

Capaian Sasaran 3 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Tercapai / Tidak	Realisasi 2022	Target Akhir Renstra
Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	90%	95%	Tercapai	95%	100%

Capaian sasaran Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dengan 1 indikator kinerja terlihat bahwa realisasi capaiannya sudah mencapai target yang ditetapkan. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh

pelayanan dari aparaturnya penyelenggaraan pelayanan public dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Kegiatan pengukuran kepuasan pelanggan dilakukan melalui penyebaran kuisioner dengan menggunakan metode sampling kepada pelanggan yang akan melakukan pelayanan. Dari 3 UPT yaitu UPT PJU, UPT PKB, dan UPT Parkir yang dijadikan tempat untuk survei indeks kepuasan masyarakat. Dimana dalam realisasinya mendapatkan hasil sebesar 95%.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

3.2.1 Realisasi Anggaran

Jumlah anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 29.174.985.225,- dengan rincian:

- a. Belanja Operasi sebesar Rp. 27.783.390.374,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.830.894.308,- atau terserap 96%.
- b. Belanja Modal sebesar Rp. 1.391.594.851,- dengan realisasi sebesar Rp. 251.198.400,- atau 18%.

Tabel 3.8

*Perbandingan Anggaran periode 2021 – 2022
(dalam ribuan rupiah)*

	Belanja Operasi	Belanja Modal	Realisasi	Persentase	Total Anggaran
Tahun 2021	Rp 26.985.771.100	Rp 301.941.000	Rp 27.287.712.100	94%	Rp 28.982.051.360
Tahun 2022	Rp 26.830.894.308	Rp 251.198.400	Rp 27.082.092.708	93%	Rp 29.174.985.225

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, pencapaian kinerja Dinas Perhubungan masih bisa berakselerasi dengan baik meskipun masih ada kebijakan refocusing anggaran di Triwulan III karena dampak pandemik tahun 2022 yang tidak semasih di tahun 2020 dan 2021.

BAB IV PENUTUP

Pagu Anggaran tahun 2022 yang nilainya sebesar Rp. 29.174.985.225,- berakselerasi dengan baik walaupun di tengah perjalanan terkena refocusing anggaran yang tidak semasif di tahun 2021. Sejalan dengan itu, Dinas Perhubungan Kota Cirebon bisa merealisasi program dan kegiatan yang sudah dicanangkan. Dalam pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2021 secara umum tujuan, program kegiatan maupun sasaran yang ditetapkan telah dapat dicapai dengan sangat baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala. Dinas Perhubungan secara umum dapat melaksanakan seluruh kegiatan dengan sangat baik dan berhasil pada tahun 2021. Hasil yang telah dicapai di Tahun ini tentunya masih perlu ditingkatkan lagi ditahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan capaian sistem akuntabilitas pemerintah secara tranparan dan inklusif.

Adanya keberhasilan capaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan berkat semua pihak keluarga besar Dinas Perhubungan Kota Cirebon yang sudah berpartisipasi aktif di kantor maupun lapangan dan kelancaran koordinasi dengan instansi verikal maupun instansi horizontal demi terlaksananya suatu kegiatan. Maka dari itu, Dinas Perhubungan mengucapkan terima kasih atas kaleidoskop kegiatan tahun 2022 yang sudah terlaksanakan dan pencapaian kinerjanya sudah sangat baik atas koordinasi dan kolaborasi kita semua.

TABEL 3.1
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Urusan pemerintahan Wajib Yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
2.15	Perhubungan	Dinas Perhubungan	-Meningkatkan Sarana dan Prasanara Pelayanan -Meningkatkan Managemen Sumber Daya Manusia Aparatur -Meningkatkan Managemen Keuangan	1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Outcome : - Terwujudnya Tertib Pelayanan Administrasi Perkantoran	22.643.429.722 100 persen	22.430.817.771 98,19 Persen			
				1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Output : - Terpenuhinya Informasi Perencanaan Sebagai Bahan dan Acuan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	270.957.144 7 jenis	270.434.470 7 jenis			
				1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Output : - Dokumen Renja PD - Dokumen Renja PD Perubahan - Dokumen Renstra PD - Dokumen Renstra Perubahan PD	4.381.000 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	4.381.000 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen			
				1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Masukan: - Dana Output : - Dokumen RKA	1.444.000 1 Dokumen	1.444.000 1 Dokumen			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mesukan: - Dana Output: - Dokumen RKAP	1.444.000 1 Dokumen	1.444.000 1 Dokumen			

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1.1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Masukan: - Dana Output : - Dokumen DPA	1.444.000 1 Dokumen	1.444.000 1 Dokumen			
				1.1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Masukan: - Dana Output: - Dokumen DPPA	1.444.000 1 Dokumen	1.444.000 1 Dokumen			
				1.1.6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Masukan: - Dana Output: - Laporan pelaksanaan realisasi kinerja tahunan - Laporan pelaksanaan realisasi kinerja triwulan - Laporan PK - Tersedianya Honor PTT	252.577.144 1 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 1 orang	252.154.470 1 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 1 orang			
				1.1.7 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Output : - Dokumen Dalev Triwulan I, II, dan III Tahun 2021 - Dokumen Dalev Triwulan IV - Dokumen SOP Disub - LAKIP - LKPJ - LPPD	8.123.000 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	8.123.000 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen			
				1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Output : - Terpenuhinya Informasi Administrasi Keuangan Sebagai Bahan Audit Keuangan Perangkat Daerah	12.437.379.018 3 jenis	12.252.471.642 3 jenis			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Masukan: - Dana Output : - Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12.432.372.018 117 orang	12.247.471.642 117 orang			
				1.2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Masukan: - Dana Output : - Laporan keuangan akhir tahun (CALK)	5.007.000 1 dokumen	5.000.000 1 dokumen			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Output: - Twujudnya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	310.016.195 1 jenis	301.232.000 1 jenis			
				1.3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beselita Atribut Kelengkapannya	Masukan: - Dana Output: - Pakaian dinas harian	310.016.195 145 stel	301.232.000 145 stel	Harga Pakaian Dinas yang lebih murah		
				1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Output: - Terpenuhiya Barana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	359.008.240 22 jenis	316.543.240 22 jenis			
				1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masukan: - Dana Output: - Alat Tulis Kantor - Materai 3000 - Materai 6000	50.654.000 600 buah 600 buah 750 buah	50.609.000 600 buah 600 buah 750 buah			
				1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Masukan: - Dana Output: - Isi tabung LPG 12 kg - Tabung APAR	1.176.000 12 kali 20 unit	900.000 12 kali 20 unit	Sudah sesuai target output		
				1.4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Masukan: - Dana Output: - Barang cetakan	8.228.240 11 jenis	5.356.840 11 jenis			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					- Penggandaan	51958 lembar	45642 lembar	Pembatasan Anggaran	Efisiensi penggunaan barang cetakan dan penggandaan	
				1.4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Masukan: - Dana Output: - Buku / Peraturan Perundang-undangan - Surat Kabar Harian Lokal - Surat Kabar Harian Nasional - Surat Kabar Harian Regional/Provinsi - Terpasangnya iklan di surat kabar harian	142.500.000 5 buku 3 koran/ media 1 koran/ media 1 koran/ media 60 iklan	113.695.000 4 koran/ media 3 koran/ media 1 koran/ media 0 koran/ media 58 iklan	Anggaran yang tersedia tidak cukup Anggaran yang tersedia tidak cukup		
				1.4.5 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Masukan: - Dana Output: - Laporan penitamaan/ kunjungan tamu.					

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1.4.8 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Masukan: - Dana Output: - Laporan makanan dan minuman harian pegawai - Laporan/ Notulansi rapat internal/briefing - Laporan hasil pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Laporan sinergitas	156.450.000 12 laporan 12 laporan 12 laporan 1 laporan	145.992.400 12 laporan 10 laporan 10 laporan - laporan	Keterbatasan anggaran yang diserap		
				1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Masukan: - Dana Output: - Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.494.080 1 jenis	-			
				1.5.3 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan: - Dana Output: Perengkapan gedung kantor	8.494.080 1 jenis		Pembatasan Penyerapan anggaran		
				1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan: - Dana Output: - Terpenuhinya jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.977.346.450 2 jenis	8.843.070.331 2 jenis			
				1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masukan: - Dana Output:	8.147.443.600	8.042.329.906	Jumlah tagihan yang mengalami fluktuasi untuk 3 gedung		

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJAUAN REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					<ul style="list-style-type: none"> - Struk pembayaran tagihan rekening air (PDAM) - Struk pembayaran tagihan rekening telepon - Struk pembayaran tagihan rekening TV 	<p>36 Struk/ Rekening</p> <p>36 Struk/ Rekening</p> <p>12 Struk/ Rekening</p>	<p>36 Struk/ Rekening</p> <p>36 Struk/ Rekening</p> <p>12 Struk/ Rekening</p>			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					- Stukr pembayaran tagihan rekening listrik	36 Stukr/ Rekening	36 Stukr/ Rekening			
				1.6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Masukan: - Dana Output : - Petugas/Tenaga pengamanan - Peralatan kebersihan dan bahan pembersih - Petugas/ Tenaga kebersihan kantor	829.902.850 15 orang 26 jenis 8 orang	800.740.425 15 orang 28 jenis 8 orang	Kurangnya anggaran yang dibutuhkan		
				1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan: - Dana Output : Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	480.328.595 5 jenis	447.066.066 4 jenis			
				1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Masukan: - Dana Output : - BBM Kendaraan R4 - Pelumas Kendaraan R4 - Servis Kendaraan R4 - Suku cadang Kendaraan R4 - STNK/SKPD PKB R4	41.886.000 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit	37.883.588 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit			
				1.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Masukan: - Dana Output : - BBM Kendaraan R2 - BBM Kendaraan R3 - BBM Kendaraan R4	339.034.000 32 unit 3 unit 8 unit	312.682.500 32 unit 2 unit 8 unit	Keterbatasan anggaran sehingga output ada yang tidak tercapai		

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					- BBM Kendaraan R6	3 unit	0 unit			
					- KIR Pick Up	4 unit	2 unit			
					- KIR Truk	3 unit	3 unit			
					- Pelumas Kendaraan R2	32 unit	32 unit			
					- Pelumas Kendaraan R3	3 unit	3 unit			
					- Pelumas Kendaraan R4	8 unit	8 unit			
					- Pelumas Kendaraan R6	3 unit	3 unit			
					- Servis Kendaraan R2	32 unit	16 unit			
					- Servis Kendaraan R3	3 unit	0 unit			
					- Servis Kendaraan R4	8 unit	2 unit			
					- Servis Kendaraan R6	3 unit	0 unit			
					- STNK/SKPD PKB Bus dan Truk	3 unit	0 unit			
					- STNK/SKPD PKB R2	32 unit	0 unit			
					- STNK/SKPD PKB R3	3 unit	0 unit			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					<ul style="list-style-type: none"> - STNK/SKPD PKB R4 - Suku Cadang Kendaraan R2 - Suku Cadang Kendaraan R3 - Suku Cadang Kendaraan R4 - Suku Cadang Kendaraan R6 	<ul style="list-style-type: none"> 5 unit 32 unit 3 unit 8 unit 3 unit 	<ul style="list-style-type: none"> 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 			
				1.7.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Masukan: <ul style="list-style-type: none"> - Dana Output : <ul style="list-style-type: none"> - Gedung kantor - Pemagaran dan pembuatan gapura kantor Dukuh Semar - Pengaspalan Terminal Dukuh Semar 	<ul style="list-style-type: none"> 94.125.600 3 unit kantor 26 m 400 m2 	<ul style="list-style-type: none"> 93.700.000 3 unit kantor 26 m 400 m2 			
				1.7.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan: <ul style="list-style-type: none"> - Dana Output : Peralatan gedung kantor	<ul style="list-style-type: none"> 2.482.995 10 jenis 		Pembatasan penyerapan		
				1.7.5 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan: <ul style="list-style-type: none"> - Dana Output : <ul style="list-style-type: none"> - Perlengkapan gedung kantor 	<ul style="list-style-type: none"> 2.800.000 2 jenis 	<ul style="list-style-type: none"> 2.800.000 2 jenis 			
			- Meningkatkan kemantapan kondisi jalan interkoneksi	2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Masukan: <ul style="list-style-type: none"> - Dana Outcome :	<ul style="list-style-type: none"> 6.331.555.503 	<ul style="list-style-type: none"> 4.651.274.937 			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>pertumbuhan ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kemandapan dan keselamatan transportasi - Membangun dan mengembangkan prasarana angkutan darat yang menghubungkan wilayah potensial yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru - Mengembangkan sistem jaringan transportasi massal perkotaan yang aman, nyaman dan terjangkau - Mengintegrasikan sistem jaringan transportasi perkotaan antar moda 	(LLW)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan Rambu rambu (jumlah pemasangan rambu/jumlah rambu yang seharusnya tersedia) x 100%) - Rasio Konektivitas kabupaten/kota ((jumlah trayek yang dilayani di kab/kota x bobot trayek /jumlah kebutuhan trayek pada kota/kab) - Persentase Pelayanan Parkir Kendaraan ((Jumlah Lokasi Parkir Yang Terdapat Jukir Dan Fasilitas Parkir/Total Jumlah Lokasi Parkir) x 100%) - Persentase Terlaksananya Uji Berkala Kendaraan Bermotor ((jumlah kendaraan yang diuji per tahun / jumlah kendaraan wajib uji) x 100%) - presentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan 	100 persen	92,62 persen			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					<p>jalan kabupaten/kota (jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten/kota / target kebutuhan perlengkapan jalan kab kota x 100%)</p> <p>- Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan ((jumlah jalan yang terlaksana audit dan inspeksi/total keseluruhan jalan) x 100%)</p> <p>- Persentase layanan angkutan darat ((jumlah angkutan darat/jumlah penumpang angkutan darat) x 100%)</p>					

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2.1 Kegiatan Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Masukan: - Dana Output: - Terwujudnya Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.582.243.517 3 jenis	1.510.892.431 3 jenis			
				2.1.1 Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Pembangunan Halte - Kajian pembangunan fasilitas halte	0 4 unit 0 dokumen	0 0 unit 0 dokumen	Refocusing anggaran		
				2.1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Masukan: - Dana Output: - Ketersediaan Operasional Pelayanan UPT PJU (crane) - Pemasangan PJU - Pemeliharaan PJU di 5 Kecamatan	694.755.273 0 unit 150 titik 8044 titik	640.858.980 0 unit 50 titik 7026 titik	Keterbatasan anggaran Belum ada Spek kendaraan yang sesuai kebutuhan Anggaran tidak mencukupi kebutuhan stok perlengkapan listrik untuk perbaikan belum mencukupi	masih akan mengupayakannya di tahun depan Dapat Bangun untuk merealisasikan target realisasi perbaikan sesuai aduan yang kami terima dan monitoring berlangsung secara 24 jam	
				2.1.3 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Masukan: - Dana Output: - Bertungnya marka jalan untuk menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas	687.488.244 0 m2	670.235.432			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					<ul style="list-style-type: none"> - Berfungsinya rambu lalu lintas untuk menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas - Tersedianya Operator ATCS Dinas Pemubangan Kota Cirebon - Traffic light untuk menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas 	<p>150 buah</p> <p>2 orang</p> <p>32 titik simpang</p>	<p>130 buah</p> <p>2 orang</p> <p>32 titik simpang</p>	Ketorbatasan anggaran	sudah sesuai dengan kebutuhan rambu berdasarkan survei dari kami	
				2.2 Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	<p>Masukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana <p>Output:</p> <p>Terwujudnya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</p>	<p>1.480.001.750</p> <p>1 jenis</p>	-			
				2.2.1 Sub Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal	<p>Masukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana <p>Output :</p> <p>Tersedianya pelayanan terminal tipe C</p>	<p>1.480.001.750</p> <p>1 tahun</p>	-	Pembatasan penyerapan anggaran		
				2.3 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	<p>Masukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana <p>Output :</p> <p>Terwujudnya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</p>	<p>314.117.000</p> <p>2 jenis</p>	<p>295.107.888</p> <p>2 jenis</p>			
				2.3.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan	<p>Masukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana <p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alat Tulis Kantor UPT Parkir - BBM dan Pemeliharaan Kendaraan 	<p>314.117.000</p> <p>24 jenis</p> <p>12 bulan</p>	<p>295.107.888</p> <p>24 jenis</p> <p>12 bulan</p>			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Cetak Kwitansi dan Karcis Retribusi Parkir - Dokumen Kajian Parkir - Pakaian Juru Parkir - Penggandaan UPT Parkir - Tersedianya Honor PTT 	<p>12400 buku</p> <p>0 dokumen</p> <p>0 stell</p> <p>6806 lembar</p> <p>1 orang</p>	<p>12241 buku</p> <p>0 dokumen</p> <p>0 stell</p> <p>6394 lembar</p> <p>1 orang</p>	<p>kebutuhan anggaran masih kurang</p> <p>kebutuhan anggaran masih kurang</p>	<p>sosialisasi tanpa karcis parkir gratis</p> <p>efisiensi penggunaan barang penggandaan</p>	
				2.4 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<p>Masukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana <p>Output :</p> <p>Terwujudnya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</p>	<p>672.039.296</p> <p>4 jenis</p>	<p>589.601.978</p> <p>4 jenis</p>			
				2.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<p>Masukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana <p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> - BBM dan Oli Genset - Tab 	<p>165.000.000</p> <p>1 tahun</p> <p>3 unit</p>	<p>114.991.950</p> <p>1 tahun</p> <p>3 unit</p>	Keterbatasan anggaran	efisiensi penggunaan perlengkapan pendukung alat uji	
				2.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<p>Masukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana <p>Output :</p> <p>Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</p>	<p>286.948.990</p> <p>2 jenis</p>	<p>256.114.590</p> <p>2 jenis</p>	kebutuhan SMARTCARD masih belum tercukupi	menbitkan surat bukti lulus uji kendaraan	
				2.4.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana	Masukan:					

NO	URUSAN/ BIDANG-URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	- Dana Output : Servis Alat Uji	42.536.000 1 tahun	42.533.000 1 tahun			
				2.4.4 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Masukan: - Dana Output : - Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	177.555.308 12 laporan	175.962.438 12 laporan			
				2.5 Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output : Tersujudnya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	740.203.940 3 jenis	711.673.240 3 jenis			
				2.5.1 Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Masukan: - Dana Output : - Halte - Marka Jalan - Paku Jalan - Rambu - rambu lalu lintas untuk menunjang keselamatan dan kelancaran berlalu lintas	189.775.200 0 unit 1570,5 mm2 0 buah 109 buah	177.034.500 0 unit 1026 mm2 0 buah 60 buah	Keterbatasan anggaran Keterbatasan anggaran	capaian disesuaikan dengan anggaran yang tersedia	
				2.5.3 Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output :	550.428.740	534.838.740	Keterbatasan anggaran yang diserap	Memaksimalkan anggaran yang ada untuk pelaksanaan kegiatan	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					<ul style="list-style-type: none"> - Menekan tingkat kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan (operasi penertiban gabungan dengan polisi) - Pemerksaan Teknis dan Lalk Jalan Angkutan Umum - Personil Pelayanan angkutan lebaran, Natal dan Tahun Baru 	<p>1 tahun</p> <p>2 kali</p> <p>3 kali</p>	<p>1 tahun</p> <p>2 kali</p> <p>3 kali</p>			
				2.6 Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	<p>Masukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana <p>Output:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 	<p>30.950.000</p> <p>0 jenis</p>	<p>15.454.000</p> <p>0 jenis</p>			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2.6.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Dokumen ltrmba tertib lalu lintas dan angkutan jalan (WTV) - Penyuluhan keselamatan pengguna kendaraan bermotor - Sosialisasi penggunaan angkutan umum pada masyarakat - Sosialisasi / penyuluhan kepada masyarakat terhadap ketertiban berlalu lintas di jalan - Terselenggaranya bimbingan teknis keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	30.950.000 0 dokumen 1 kali 0 kali 3 kali 1 kali	15.454.000 0 dokumen 1 kali 0 kali 3 kali 1 kali	Keterbatasan Anggaran	Memaksimalkan anggaran yang ada untuk pelaksanaan kegiatan	
				2.7 Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output Terwujudnya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	1.532.000.000 1 jenis	1.528.545.400 1 jenis			
				2.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: Trayek BRT di Kota Cirebon	1.532.000.000 1 lintas trayek	1.528.545.400 1 lintas trayek			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						29.174.985.225	27.082.092.708			
Jumlah										

Cirebon, 30 Januari 2023
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KOTA CIREBON



Drs. ANDI ARMAWAN
 NIP. 196912141990031005



PEMERINTAH KOTA CIREBON
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2022
periode 01 Desember 2022 s.d. 31 Desember 2022

Urusan Pemerintahan : 2.15 PERHUBUNGAN
SKPD : 2-15.0-00.0-00.01 DINAS PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.000.000 DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN DAERAH	6.661.073.350,00	4.078.212.459,00	0,00	4.078.212.459,00	(2.582.860.891,00)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.661.073.350,00	4.078.212.459,00	0,00	4.078.212.459,00	(2.582.860.891,00)
4.1.02	Retribusi Daerah	6.661.073.350,00	4.078.212.459,00	0,00	4.078.212.459,00	(2.582.860.891,00)
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	6.637.073.350,00	4.039.532.459,00	0,00	4.039.532.459,00	(2.597.540.891,00)
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.637.073.350,00	2.104.617.000,00	0,00	2.104.617.000,00	(2.532.456.350,00)
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.637.073.350,00	2.104.617.000,00	0,00	2.104.617.000,00	(2.532.456.350,00)
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.000.000.000,00	1.934.915.459,00	0,00	1.934.915.459,00	(65.084.541,00)
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.000.000.000,00	1.934.915.459,00	0,00	1.934.915.459,00	(65.084.541,00)
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	24.000.000,00	38.680.000,00	0,00	38.680.000,00	14.680.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	24.000.000,00	38.680.000,00	0,00	38.680.000,00	14.680.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempal Khusus Parkir	24.000.000,00	38.680.000,00	0,00	38.680.000,00	14.680.000,00
5	BELANJA DAERAH	29.174.985.225,00	23.289.096.959,00	3.322.476.813,00	26.611.573.772,00	(2.563.411.453,00)
5.1	BELANJA OPERASI	27.783.390.374,00	23.114.096.959,00	3.246.278.413,00	26.360.375.372,00	(1.423.015.002,00)
5.1.01	Belanja Pegawai	12.469.013.018,00	11.259.624.635,00	1.003.397.007,00	12.263.021.642,00	(205.991.376,00)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.621.727.718,00	6.058.618.765,00	473.119.171,00	6.531.737.936,00	(89.989.782,00)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	4.905.361.733,00	4.489.324.600,00	346.619.520,00	4.835.944.120,00	(69.417.613,00)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	4.905.361.733,00	4.489.324.600,00	346.619.520,00	4.835.944.120,00	(69.417.613,00)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	527.864.230,00	482.624.434,00	37.646.802,00	520.271.236,00	(7.592.994,00)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	527.864.230,00	482.624.434,00	37.646.802,00	520.271.236,00	(7.592.994,00)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	209.370.000,00	191.295.000,00	14.715.000,00	206.010.000,00	(3.360.000,00)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	209.370.000,00	191.295.000,00	14.715.000,00	206.010.000,00	(3.360.000,00)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	23.090.000,00	20.655.000,00	1.555.000,00	22.210.000,00	(880.000,00)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	23.090.000,00	20.655.000,00	1.555.000,00	22.210.000,00	(880.000,00)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	200.245.000,00	185.830.000,00	14.325.000,00	200.155.000,00	(90.000,00)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	200.245.000,00	185.830.000,00	14.325.000,00	200.155.000,00	(90.000,00)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	312.493.000,00	296.928.040,00	22.232.940,00	309.160.980,00	(3.332.020,00)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	312.493.000,00	296.928.040,00	22.232.940,00	309.160.980,00	(3.332.020,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	16.977.030,00	14.317.568,00	671.950,00	14.989.518,00	(1.987.484,00)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	16.977.030,00	14.317.568,00	671.950,00	14.989.518,00	(1.987.484,00)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	108.758,00	50.435,00	4.640,00	64.075,00	(44.680,00)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	108.758,00	50.435,00	4.640,00	64.075,00	(44.680,00)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	386.339.030,00	351.182.595,00	32.020.759,00	383.203.354,00	(3.135.646,00)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	386.339.030,00	351.182.595,00	32.020.759,00	383.203.354,00	(3.135.646,00)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.970.000,00	9.100.546,00	831.893,00	9.932.439,00	(37.561,00)
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	9.970.000,00	9.100.546,00	831.893,00	9.932.439,00	(37.561,00)
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	29.909.030,00	27.301.549,00	2.495.667,00	29.797.216,00	(111.784,00)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	29.909.030,00	27.301.549,00	2.495.667,00	29.797.216,00	(111.784,00)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.709.429.030,00	5.185.313.870,00	428.220.836,00	5.613.534.706,00	(95.894.294,00)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.709.429.030,00	5.185.313.870,00	428.220.836,00	5.613.534.706,00	(95.894.294,00)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.709.429.030,00	5.185.313.870,00	428.220.836,00	5.613.534.706,00	(95.894.294,00)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	137.856.330,00	15.632.000,00	102.057.000,00	117.749.000,00	(20.107.330,00)
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	101.215.330,00	0,00	101.199.000,00	101.199.000,00	(16.300,00)
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	100.016.330,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	(16.300,00)
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	1.199.000,00	0,00	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	36.641.000,00	15.892.000,00	858.000,00	16.550.000,00	(20.091.000,00)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	36.641.000,00	15.892.000,00	858.000,00	16.550.000,00	(20.091.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.814.377.350,00	11.104.472.324,00	1.492.881.406,00	12.597.353.730,00	(1.217.023.620,00)
5.1.02.01	Belanja Barang	2.440.865.632,00	1.511.857.243,00	293.008.594,00	1.804.865.837,00	(635.999.795,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.440.865.632,00	1.511.857.243,00	293.008.594,00	1.804.865.837,00	(635.999.795,00)
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	237.754.630,00	0,00	0,00	0,00	(237.754.630,00)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	583.107.400,00	418.011.000,00	25.818.200,00	444.829.200,00	(138.278.200,00)
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Bal Tambong Gas	1.178.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.178.000,00)
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	457.666.480,00	243.522.315,00	198.595.450,00	440.097.765,00	(17.588.720,00)
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	6.953.100,00	6.953.100,00	0,00	6.953.100,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	383.057.475,00	358.414.330,00	0,00	358.414.330,00	(34.643.145,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	170.391.725,00	137.432.296,00	400.500,00	137.832.796,00	(33.158.927,00)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.990.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	(390.000,00)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	208.971.638,00	144.298.800,00	55.745.944,00	200.044.744,00	(8.926.894,00)
5.1.02.01.01.0038	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.317.140,00	0,00	0,00	0,00	(2.317.140,00)
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dari Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	34.210.030,00	24.275.400,00	2.748.500,00	27.023.900,00	(7.186.100,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	312.650.030,00	153.970.000,00	11.600.000,00	165.570.000,00	(147.080.000,00)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	30.000.000,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	(7.500.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa	10.464.566.854,00	8.802.488.018,00	1.164.312.812,00	9.966.800.830,00	(497.866.034,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.437.216.030,00	8.787.056.242,00	1.164.112.580,00	9.951.178.822,00	(486.037.258,00)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	58.800.000,00	0,00	0,00	0,00	(58.800.000,00)
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	245.990.030,00	149.490.000,00	5.000.000,00	155.490.000,00	(90.500.000,00)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	512.910.030,00	387.820.000,00	41.130.000,00	428.950.000,00	(83.960.000,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	30.281.000,00	0,00	0,00	0,00	(30.281.000,00)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	278.400.000,00	204.335.540,00	61.536.460,00	265.872.000,00	(12.528.000,00)
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	540.000.000,00	410.417.137,00	115.380.863,00	525.798.000,00	(14.202.000,00)
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik	20.523.980,00	2.000.000,00	18.523.980,00	20.523.980,00	0,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.750.000,00)
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pematretan	130.500.000,00	12.500.000,00	83.000.000,00	95.500.000,00	(35.000.000,00)
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	6.000.000,00	431.382,00	36.686,00	470.068,00	(5.529.932,00)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	10.560.000,00	6.436.395,00	654.075,00	7.110.470,00	(3.449.530,00)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	6.116.633.600,00	7.286.632.838,00	719.656.116,00	8.006.320.954,00	(112.312.646,00)
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	22.500.000,00	15.771.000,00	1.483.000,00	17.254.000,00	(5.246.000,00)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	399.850.000,00	291.101.050,00	106.107.400,00	397.208.450,00	(2.641.550,00)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	49.917.500,00	20.030.950,00	0,00	20.060.900,00	(29.856.600,00)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.402.734,00	1.789.776,00	200.232,00	1.990.008,00	(412.726,00)
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.067.904,00	795.456,00	88.992,00	884.448,00	(1.523.456,00)
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.334.830,00	994.320,00	111.240,00	1.105.560,00	(229.270,00)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	25.048.000,00	13.632.000,00	0,00	13.632.000,00	(11.416.000,00)
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7.480.000,00	0,00	0,00	0,00	(7.480.000,00)
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	11.760.000,00	11.520.000,00	0,00	11.520.000,00	(240.000,00)
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	5.808.000,00	2.112.000,00	0,00	2.112.000,00	(3.696.000,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	640.404.800,00	725.127.063,00	35.560.000,00	760.687.063,00	(19.717.797,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	369.242.000,00	311.237.698,00	35.560.000,00	346.797.698,00	(42.444.302,00)
5.1.02.03.02.0021	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Compressor	4.270.000,00	0,00	4.270.000,00	4.270.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor-Petorangan	23.760.000,00	16.495.038,00	0,00	16.495.038,00	(7.264.962,00)
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	58.300.000,00	43.000.510,00	0,00	43.000.510,00	(15.299.490,00)
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	46.610.000,00	33.214.650,00	0,00	33.214.650,00	(13.395.350,00)
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	4.200.000,00	2.832.000,00	0,00	2.832.000,00	(1.368.000,00)
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	69.990.000,00	46.137.500,00	34.740.000,00	69.877.500,00	(112.500,00)
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	126.050.000,00	124.046.000,00	0,00	124.046.000,00	(2.004.000,00)
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	46.512.000,00	46.512.000,00	0,00	46.512.000,00	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	451.162.800,00	413.829.365,00	0,00	413.889.365,00	(37.273.435,00)
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	451.162.800,00	413.829.365,00	0,00	413.889.365,00	(37.273.435,00)
5.1.02.04	Belanja Penanaman Dinas	66.440.000,00	66.000.000,00	0,00	66.000.000,00	(440.000,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	66.440.000,00	66.000.000,00	0,00	66.000.000,00	(3.440.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Busi	66.440.000,00	66.000.000,00	0,00	66.000.000,00	(3.440.000,00)
5.1.04	Belanja Subsidi	1.500.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.500.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.500.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.500.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	1.391.594.851,00	175.000.000,00	76.198.400,00	251.198.400,00	(1.140.396.451,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	289.715.000,00	167.975.200,00	76.198.400,00	244.173.600,00	(45.541.400,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	13.232.000,00	0,00	0,00	0,00	(13.232.000,00)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	13.232.000,00	0,00	0,00	0,00	(13.232.000,00)
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.494.000,00	0,00	0,00	0,00	(8.494.000,00)
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	4.738.000,00	0,00	0,00	0,00	(4.738.000,00)
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	663.600,00	0,00	0,00	0,00	(663.600,00)
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	663.600,00	0,00	0,00	0,00	(663.600,00)
5.2.02.08.01.0010	Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	663.600,00	0,00	0,00	0,00	(663.600,00)
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	63.619.320,00	0,00	76.198.400,00	76.198.400,00	(7.420.920,00)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	62.419.320,00	0,00	74.998.400,00	74.998.400,00	(7.420.920,00)
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	68.768.320,00	0,00	68.767.400,00	68.767.400,00	(920,00)
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	13.651.000,00	0,00	6.231.000,00	6.231.000,00	(7.420.000,00)
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	22.200.000,00	0,00	0,00	0,00	(22.200.000,00)
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	22.200.000,00	0,00	0,00	0,00	(22.200.000,00)
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	22.200.000,00	0,00	0,00	0,00	(22.200.000,00)
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	170.000.000,00	167.975.200,00	0,00	167.975.200,00	(2.024.800,00)
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	170.000.000,00	167.975.200,00	0,00	167.975.200,00	(2.024.800,00)
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	110.000.000,00	108.334.000,00	0,00	108.334.000,00	(1.666.000,00)
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	60.000.000,00	59.641.200,00	0,00	59.641.200,00	(358.800,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.101.879.851,00	7.024.800,00	0,00	7.024.800,00	(1.094.855.051,00)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.101.879.851,00	7.024.800,00	0,00	7.024.800,00	(1.094.855.051,00)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.101.879.851,00	7.024.800,00	0,00	7.024.800,00	(1.094.855.051,00)
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.094.740.151,00	0,00	0,00	0,00	(1.094.740.151,00)
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	7.139.700,00	7.024.800,00	0,00	7.024.800,00	(114.900,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(22.513.911.875,00)	0,00	(3.322.476.813,00)	(22.533.361.313,00)	(19.449.438,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(22.513.911.875,00)	0,00	(3.322.476.813,00)	(22.533.361.313,00)	(19.449.438,00)

